

Tindakan Pemerintah Thailand Dalam Merespons Gerakan Etnonasionalisme di Thailand Selatan Tahun 2004 – 2006.

Gede Richard Pramudita, Idin Fasisaka, Putu Titah Kawatri Resen.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: richardpramudita@yahoo.com, idinfasisaka@yahoo.co.id,
kawitrirese@unud.ac.id

ABSTACK

Thailand is the only country in Southeast Asia that had never been colonized. But Thailand was inseparable from the problem of the country's internal conflict. The conflict happened between the Government of Thailand with a Muslim minority ethnic Malays in Southern Thailand. Conflict caused by ethno-nationalism movement which happened for a century and more drawn out. In southern Thailand, tension and violence occurred every day. The conflict was capable considered of threatening national security and forced the Thai government to take more serious action in response. This study aimed to describe the action taken by Thai government in response to ethno-nationalism movement in Southern Thailand in 2004 – 2006. The research method that used was descriptive qualitative. Ethno-nationalism and coercive measures were the concept that used to discuss this study.

Keyword: Thailand, Conflict, Southern Thailand, Ethno-nationalism, Coercive measures.

1. LATAR BELAKANG

Thailand merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Meskipun demikian, negara ini tidak luput dari permasalahan konflik dalam wilayahnya. Konflik yang terjadi adalah konflik antara Pemerintah Thailand dengan kaum minoritas yaitu etnis Muslim Melayu. Konflik yang terjadi telah berlangsung sejak awal tahun 1990-

an dan hingga kini masih belum menemukan titik temu ini terjadi karena etnis Muslim Melayu menuntut akan kemerdekaan dan berusaha melepaskan diri dari wilayah dan pemerintahan Thailand.

Konflik berawal dari aksi protes yang dilakukan Etnis Muslim Melayu terhadap Pemerintah Thailand. Mereka menganggap kebijakan - kebijakan yang

dikeluarkan oleh Pemerintah Thailand tidak memihak dan diskriminatif terhadap mereka. Aksi protes tersebut dilakukan dengan melakukan pemberontakan di sejumlah wilayah. Mobilisasi massa dan pemberontakan yang dilakukan etnis Muslim Melayu terjadi karena adanya kecemasan akan keberlangsungan etnis dan identitas mereka. Pemberontakan yang terjadi mulai dari aksi yang kecil hingga aksi yang besar dan terorganisir. Aksi ini mereka lakukan adalah untuk mencari simpati dan dukungan internasional. Mereka berharap dengan adanya dukungan dari dunia internasional, aspirasi mereka dapat lebih didengar dan mendapatkan jaminan perlindungan. Namun seiring waktu berjalan, aksi protes yang dilakukan oleh masyarakat etnis Muslim Melayu tidak lagi bertujuan untuk mencari simpati dan dukungan internasional, namun berkembang menjadi keinginan untuk mendirikan pemerintahan sendiri. (Yuniarto, 2004;166).

Pemberontakan untuk menuntut kemerdekaan etnis Muslim Melayu yang terjadi di Thailand dalam Liow (2006), dilakukan oleh organisasi-organisasi seperti BRN - C (*Barisan Revolusi Nasional Coordinate*), PULO (*Pattani United Liberation Organization*), dan GMIP (*Gerakan Mujahideen Islam Pattani*). Ketiga organisasi ini merupakan

kelompok etnonasionalis yang menuntut akan kemerdekaan yang dipayungi dan dikoordinasi satu organisasi besar dalam tiap gerakan dan pemberontakan yang dilakukannya, organisasi tersebut adalah Bersatu. Organisasi ini melakukan aksinya dengan melakukan pengrusakan terhadap pos polisi, militer dan infrastruktur pemerintahan yang lain.

Ketegangan terjadi hampir di seluruh wilayah Thailand Selatan. Adanya organisasi-organisasi tersebut berpengaruh besar pada gerakan pemberontakan yang terjadi di Thailand Selatan. Serangan – serangan yang dilancarkan kepada pemerintah Thailand semakin gencar dilakukan, serangan yang terjadi juga semakin terarah dan terkoordinasi. Di tahun 2004 saja telah terjadi ratusan aksi protes dan pengrusakan yang dilakukan oleh masyarakat etnis Muslim Melayu ini (Thnaprarnsing, 2009:1).

Kekerasan yang terjadi di wilayah Thailand Selatan kemudian berkembang dan semakin meluas. Para pemberontak tidak hanya menyerang aparat negara dan sarana pemerintah saja, namun mulai melakukan serangan dan pengeboman di kawasan publik dan mengakibatkan jatuhnya korban dari masyarakat sipil. Serangan yang terjadi meliputi serangan terhadap sekolah – sekolah, pasar,

maupun stasiun dan terminal. Serangan – serangan ini menimbulkan korban jiwa 64 guru dan terbakarnya 72 sekolah (Storey, 2007:4).

Serangan yang dilakukan menargetkan kawasan yang ramai penduduk atau merupakan daerah yang ramai dikunjungi seperti pasar dan lain sebagainya. Serangan yang terjadi dilakukan dengan melakukan penembakan secara membabi buta. Hal ini dilakukan untuk menambah korban jiwa dari pihak sipil yang mereka anggap berpihak kepada Pemerintah Thailand. Terhitung serangan dari kaum militan terjadi di 11 lokasi berbeda di Thailand Selatan dan 106 jiwa menjadi korban di awal tahun 2004 dan hingga pertengahan tahun 2005 di daerah konflik seperti Yala, Narathiwat dan Patani telah memakan korban jiwa sebanyak 3500 jiwa (McCargo, 2010:75).

Aksi pemberontakan yang dilakukan dengan jalan kekerasan oleh etnis Muslim Melayu ini telah menimbulkan keresahan dan teror bagi masyarakat Thailand Selatan yang lain. Sehingga Pemerintah Thailand merasa perlu melakukan tindakan untuk merespon gerakan pemberontakan yang terjadi di wilayahnya. Maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian mengenai tindakan Pemerintah Thailand dalam merespon gerakan etnonasionalis di

Thailand Selatan tahun 2004 - 2006 karena pada tahun tersebut terjadi eskalasi jumlah kekerasan di Thailand Selatan, dan ribuan jiwa melayang akibat konflik antara Pemerintah Thailand dengan kaum etnonasionalis Muslim Melayu ini (Manmuang, 2013:2).

2. KAJIAN PUSTAKA

Ada tiga penelitian yang digunakan peneliti sebagai kajian pustaka dalam tulisan ini. Penelitian pertama yang digunakan sebagai kajian pustaka adalah penelitian yang dilakukan Paulus Rudolf Yuniarto pada tahun 2005. Penelitiannya berjudul "Minoritas Muslim Thailand: Asimilasi, Perlawanan Budaya, dan Akar Gerakan Separatisme" yang dimuat dalam Jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume VII No.1 tahun 2005. Penelitian ini menjadi salah satu kajian karena Yuniarto (2005) membahas mengenai identitas Muslim Melayu serta faktor - faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik di Thailand Selatan. Yuniarto (2005) secara jelas mendeskripsikan sejarah etnis Muslim Melayu dan masalah yang dialami oleh Muslim Melayu yang menjadi kaum minoritas setelah menjadi bagian dari pemerintahan Thailand. Salah satu masalah yang dialami etnis ini adalah adanya asimilasi budaya yang dilakukan

oleh Pemerintah Thailand sebagai langkah melakukan kebijakan integrasi nasional. Kebijakan-kebijakan asimilasi Pemerintah Thailand dinilai semakin menyudutkan posisi kaum Muslim Melayu sebagai etnis minoritas. Keadaan ini yang kemudian memaksa Muslim Melayu melakukan gerakan pemberontakan kepada pemerintah untuk menuntut kemerdekaan.

Kajian kedua yang digunakan adalah penelitian yang dilakukan Thnaprarnsing pada tahun 2009 yang berjudul "Solving the Conflict in Southern Thailand". Dalam penelitiannya Thnaprarnsing (2009) menulis mengenai identitas etnis Muslim Melayu, serta faktor - faktor yang menjadi melatar belakang etnis ini melakukan gerakan pemberontakan terhadap Pemerintah Thailand. Thnaprarnsing (2009) juga memberikan analisa mengenai resolusi alternatif dan strategi kebijakan yang mungkin mampu menyelesaikan konflik yang terjadi di Thailand Selatan ini.

Kajian terakhir yang digunakan adalah penelitian yang dilakukan oleh Che Mohd Aziz Yacoob pada tahun 2011. Penelitiannya berjudul "Isu dan Penyelesaian: Konflik Pemisah di Thailand Selatan" yang terbit pada tahun 2011. Penelitian ini menjadi salah satu kajian pustaka yang digunakan penulis karena pada penelitian ini Yacoob (2011)

membahas mengenai sebab-sebab terjadinya konflik yang terjadi di Thailand Selatan, membahas etnis Muslim Melayu, dan membahas mengenai pendekatan – pendekatan yang dilakukan Pemerintah Thailand dalam upayanya menangani konflik di Thailand Selatan. Yacoob (2011) mendeskripsikan bagaimana pendekatan yang dilakukan pemerintah Thailand tidak mengurai masalah namun menimbulkan isu - isu baru.

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas secara deskriptif tentang konflik di Thailand Selatan dan lebih memfokuskan mengenai tindakan yang dilakukan Pemerintah Thailand dalam merespon gerakan etnonasionalis yang terjadi di Thailand Selatan tahun 2004 hingga 2006 yang mampu mengancam keamanan nasional negaranya.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memperoleh gambaran akan masalah yang diteliti berupa ulasan tertulis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari data tertulis seperti buku, jurnal, artikel ilmiah maupun berita – berita. Dalam mendukung tulisan ini, peneliti menggunakan dua konsep yaitu

konsep Etnonasionalisme dan konsep tindakan koersif.

Melalui tulisan ini penulis berharap pembaca memperoleh informasi mengenai tindakan – tindakan yang dilakukan Pemerintah Thailand dalam merespons gerakan etnonasionalisme di Thailand Selatan tahun 2004 – 2006.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketegangan yang ditimbulkan oleh kelompok etnonasionalisme ini sudah berkembang menjadi teror bagi masyarakat di Thailand Selatan. Hal ini dikarenakan kekerasan semakin sering terjadi di kawasan Thailand Selatan. Serangan yang dilakukan oleh kelompok etnonasionalisme etnis Muslim Melayu bahkan terjadi hampir setiap hari. Serangan yang dilakukan pun semakin beragam. Mulai dari melakukan serangan terhadap kawasan publik, sarana dan prasarana pemerintahan, perkantoran, hingga melakukan serangan terhadap pos dan markas militer Thailand.

Serangan yang dilakukan kelompok etnonasionalisme ini semakin berkembang dan semakin efektif. Hal ini dapat dilihat dari serangan-serangan yang dilakukan selalu terencana dan terorganisir. Senjata berat dan bahan peledak mulai sering digunakan dalam

melancarkan aksinya. Ini berdampak pada meningkat pesatnya kerusakan yang ditimbulkan dan korban jiwa yang berjatuhan. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, kelompok ini memang mengincar akan adanya korban jiwa dan yang menjadi prioritas target mereka adalah aparat pemerintah serta warga etnis Thai. Hal ini dilakukan untuk menimbulkan teror terhadap pihak yang memiliki perbedaan paham dengan kelompok ini. Tujuan mereka adalah untuk mengusir etnis Thai dari Thailand Selatan untuk melancarkan rencana mereka dalam mendirikan negara Islam dan mengulang kejayaan etnis Muslim Melayu.

Keadaan di wilayah Thailand Selatan yang semakin tidak terkendali karena serangan yang ditimbulkan kelompok etnonasionalis etnis Muslim Melayu ini memaksa Pemerintah Thailand untuk lebih serius dalam menangani masalah yang terjadi disana. Karena kelompok ini telah menimbulkan teror terhadap warga Thailand yang lain yang berdomisili di Thailand Selatan dan sekitarnya. Serangan yang dilancarkan terhadap sarana publik, perkantoran dan markas militer dianggap suatu tindakan yang dapat mengganggu dan mengancam stabilitas pemerintahan dan negara. Dalam menangani masalah yang ditimbulkan oleh kelompok etnonasionalisme etnis Muslim Melayu di

Thailand Selatan, Pemerintah Thailand melakukan sejumlah tindakan supresif dalam merespon. Dipilihnya tindakan ini karena Pemerintah Thailand telah menyatakan tidak akan melakukan negosiasi dengan pemberontak (McCargo, 2010:9).

4.1. RESPON PEMERINTAH THAILAND TAHUN 2004

Sejak meningkatnya serangan kelompok etnonasionalis yang terjadi di Thailand Selatan, Pemerintah Thailand memutuskan untuk meningkatkan dan merubah strategi dalam menghadapi permasalahan ini. Sebelumnya, pemerintah pusat bersikeras mengatakan bahwa situasi yang terjadi di kawasan Thailand Selatan ini merupakan tindakan kriminal biasa dan bisa diselesaikan hanya dengan menggunakan aparat keamanan setempat. Namun, keadaan yang kian memanas di tahun 2004 memaksa Pemerintah Thailand menghadapi realita bahwa kelompok etnonasionalis ini harus dihadapi dengan tindakan dan strategi yang lebih serius.

Keseriusan keinginan Pemerintah Thailand untuk segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Thailand Selatan ini terlihat dari Pemerintah

Thailand yang memutuskan untuk memberlakukan undang – undang darurat militer di wilayah Thailand Selatan pada tahun 2004. Bersamaan dengan itu, Pemerintah Thailand mengirimkan 10.000 tentara ke wilayah Thailand Selatan untuk menambah kekuatan militer 20.000 tentara yang telah dikirimkan sebelumnya. Aparat militer ini memiliki tugas untuk menangkap oknum-oknum yang dicurigai terlibat dalam serangan yang dilakukan kelompok etnonasionalisme di Thailand Selatan. Aparat militer dan kepolisian Thailand diberikan instruksi untuk menggunakan cara – cara tegas dalam menangani kelompok Muslim Melayu yang dicurigai terlibat dalam serangan (Jones, 2007:2).

Sejak awal tahun 2004, Pemerintah Thailand sudah menangkap dan menahan warga yang dicurigai terlibat dalam serangan yang terjadi di Thailand Selatan. Beberapa dari mereka sudah dilepaskan, namun sebagian lagi masih tidak jelas bagaimana nasibnya. Kebanyakan dari mereka yang ditangkap adalah orang – orang yang merupakan tenaga pengajar di sekolah Islam di Patani dengan tuduhan terlibat dalam perampokan, pembakaran serta pembunuhan yang dilakukan di Thailand Selatan.

Mereka yang dicurigai terlibat dalam kekerasan yang terjadi di Thailand Selatan ditangkap dan ditahan di beberapa lokasi. Mereka di tahan di pos – pos polisi, penjara maupun kamp militer yang tersebar di provinsi Yala dan Patani. Orang – orang yang dicurigai ini diinterogasi dan dipaksa untuk mengakui keterlibatan mereka dalam serangan yang terjadi di Thailand Selatan. Mereka juga dipaksa untuk menyebutkan nama – nama orang yang ikut serta dalam serangan tersebut. Selain diinterogasi, mereka di tahan dan dilarang untuk bertemu dan berkomunikasi dengan keluarga mereka.

Penangkapan yang dilakukan didasari pasal 12 dari *emergency Decree* yang menyatakan “*Shall be detained in a designated place which is not a police station, detention centre, penal institution or prison*” atau dengan kata lain Pemerintah Thailand memiliki kewenangan untuk menahan orang-orang yang dicurigai terlibat dalam kekerasan yang terjadi di Thailand Selatan di tempat manapun yang telah ditentukan pemerintah. Sebagian besar dari orang – orang yang ditangkap dibawa ke pusat pelatihan kepolisian yang berada di provinsi Yala atau kamp militer Inkayut. Orang – orang yang ditahan ini kebanyakan adalah orang yang ditahan karena dicurigai dengan hanya sedikit bukti yang ada. Yang lebih memberatkan

mereka, saat penahanan berlangsung mereka tidak diberikan kewenangan untuk didampingi pengacara, sehingga banyak dari mereka tidak mengetahui hak – hak mereka.

Seperti yang dikutip dari Melvin (2007) yang mendapatkan data dari Amnesty International, bahwa semakin hari terhitung sejak awal tahun 2004 semakin banyak orang yang ditahan atas tuduhan keterlibatan mereka dalam kekerasan dan serangan yang dilakukan kelompok etnonasionalisme di Thailand Selatan. Bahkan, perlakuan yang mereka terima jauh dari rasa prikemanusiaan, karena mereka yang ditahan juga dipancang atau kaki dan tangan mereka diikat dengan rantai dan beban seberat minimal 4,5 kilogram pada ujungnya. Di salah satu penjara di Thailand misalnya, di Bangkwang Maximum Security Prison, pemancangan dan pemasangan rantai pada tahanan merupakan hal yang biasa dan rutin untuk dilihat setiap hari. Perlakuan terhadap tahanan yang dipancang dan dirantai hampir merata diterima, walaupun ada diantara mereka yang hanya ditahan karena isu yang ringan seperti pencurian.

Selain adanya pemancangan dan pemasangan rantai, ada perlakuan yang berbeda yang diterima bagi tahanan yang merupakan anggota organisasi

keagamaan, pekerja migran dan pengungsi dari etnis Muslim Melayu. Mereka disiksa dan dipukuli oleh aparat baik itu polisi maupun tentara. Siksaan dan pemukulan mereka terima rutin hingga mereka mau membuka mulut mengenai keterlibatan mereka dengan kekerasan maupun serangan yang terjadi di Thailand Selatan.

Namun dari banyaknya tindakan yang dilakukan Pemerintah Thailand, ada dua tindakan yang dilakukan Pemerintah Thailand dalam merespon serangan yang dilakukan kelompok etnonasionalisme Muslim Melayu pada tahun 2004 yang menjadi sorotan dunia internasional.

Pertama adalah tindakan Pemerintah Thailand dalam merespon serangan yang dilakukan pemberontak pada tanggal 28 April 2004 yang lebih dikenal dengan peristiwa Krue Sue. Krue Sue merupakan sebuah mesjid yang dibangun pada abad 16. Krue Sue yang terletak di Baan Krue Sue sekitar 6 kilometer dari Patani merupakan mesjid pertama yang dibangun dengan menggunakan gaya bangunan timur tengah. Mesjid ini merupakan salah satu peninggalan fisik dari kejayaan Muslim-Melayu dan Kerajaan Patani di Asia Tenggara (Pandya, 2009:48).

Peristiwa tersebut berawal dari serangan kelompok etnonasionalisme di

12 lokasi berbeda di Thailand Selatan. Diperkirakan paling tidak sebanyak 100 orang terlibat dalam penyerangan tersebut. Serangan yang dilakukan oleh kelompok etnonasionalisme ini menggunakan golok, pedang, serta senjata tajam lainnya. Target serangan adalah pos polisi serta fasilitas militer yang berada di wilayah Yala, Songkhla dan Patani. Serangan difokuskan pada fasilitas militer dan bukan fasilitas negara yang lain adalah untuk melakukan penjarahan terhadap senjata dan barang berharga yang lain. Serangan ini memakan korban 108 jiwa dari kelompok etnonasionalisme, 5 korban jiwa dari pihak kepolisian dan puluhan lainnya luka – luka.

Setelah berhasil melakukan serangan dan penjarahan, kelompok etnonasionalisme ini kemudian melarikan diri dan berkumpul di Mesjid Krue Sue. Polisi dan militer Thailand yang berhasil mengejar kemudian mengepung kelompok etnonasionalisme yang berada di dalam mesjid tersebut. Polisi dan militer Thailand yang saat itu berada disana diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan fisik dan penggunaan senjata tajam untuk menangkap kelompok etnonasionalis yang bersembunyi di dalam. Kewenangan itu diberikan langsung oleh Wakil Perdana Menteri Thailand Chavalit Yongchaiyudh. Dengan

diberikannya kewenangan tersebut, polisi dan militer langsung melepaskan serangan balasan terhadap kelompok etnonasionalis yang bersembunyi di dalam Masjid Krue Sue. Mulai dari pistol, senjata buru laras panjang hingga peluncur roket di tembakkan ke dalam mesjid setelah sebelumnya diawali dengan melempar gas air mata. Serangan ini berakibat jatuhnya korban sebanyak 32 jiwa dari pihak pemberontak dan 1 orang sipil yang kebetulan berada di lokasi kejadian (Liow, 2006:36).

Pasca kejadian tersebut diadakan penyelidikan cepat yang dipimpin oleh Senat Thailand Kraisak Choonhavan. Penyelidikan dilakukan karena adanya tekanan dari masyarakat dan dunia internasional terhadap militer Thailand karena tindakannya tersebut. Pada penyelidikan ini ditemukan fakta bahwa pada jasad anggota kelompok etnonasionalisme yang meninggal di lokasi kejadian terdapat luka tembak pada pelipis dan bekas jerat tali pada kedua pergelangan tangan dan kaki. Hal ini mengindikasikan bahwa ada beberapa dari mereka yang sudah berhasil ditangkap yang kemudian disiksa dan dibunuh dengan kaki tangan yang terikat. Namun penyelidikan ini hanya sampai disitu saja, tanpa ada pengusutan lebih lanjut mengenai oknum-oknum yang harus bertanggung jawab.

Tindakan Pemerintah Thailand yang kedua adalah terjadi pada tanggal 25 Oktober 2004 yang lebih dikenal dengan peristiwa Tak Bai. Peristiwa diawali dari aksi demonstrasi masyarakat didepan sebuah kantor polisi di provinsi Narathiwat. Aksi demonstrasi yang dilakukan ini adalah untuk menunjukkan aksi protes mereka terhadap kebijakan darurat militer yang diberlakukan oleh Pemerintah Thailand di Thailand Selatan. Setelah berlangsung selama beberapa jam, aksi demonstrasi ini berkembang menjadi tidak terkendali. Demonstrasi berusaha menerobos barikade penjagaan polisi dan masuk ke dalam. Ketegangan tidak terelakkan, aksi saling dorong antara petugas keamanan dan demonstrasi berlangsung ricuh. Beberapa dari demonstrasi mulai melempari petugas dengan menggunakan batu dan benda lain yang bisa mereka temukan. Polisi dan Militer menanggapi aksi tersebut dengan menyemprotkan semprotan air dan gas air mata ke arah demonstrasi. Karena situasi yang semakin kacau, militer Thailand mulai memberikan tembakan peringatan ke udara, dan kemudian melakukan tembakan langsung ke arah demonstrasi dengan menggunakan peluru tajam.

Sebanyak 7 orang dikabarkan menjadi korban atas tragedi penembakan itu. Sisanya ditangkap dan dipukuli

oleh petugas. Demonstran yang tertangkap juga dipaksa untuk tengkurap di tanah dibawah terik matahari dengan kedua tangan di belakang kepala. Sebanyak 1.300 demonstran yang tertangkap kemudian diangkut untuk dipindahkan ke kamp militer Inkayut yang berada di provinsi Patani dengan cara dijejalkan kedalam truk. Pengangkutan demonstran yang memakan 5 jam waktu perjalanan mengakibatkan banyak demonstran yang tersiksa. Dilaporkan sebanyak 78 orang meninggal karena sesak nafas dan kerusakan organ dalam karena tertindih (Nurakkate, 2012:9).

Pemerintah Thailand kemudian membentuk dua komisi dalam mengusut tragedi *Krue Se Mosque* dan *Tak Bai*. Dalam laporan yang dipublikasikan oleh komisi ini menyatakan bahwa penembakan oleh aparat militer terhadap pemberontak di dalam Masjid Krue Sue merupakan respon mereka karena merasa terancam akan tembakan yang telah lebih dulu dilepaskan pemberontak dari dalam. Sedangkan laporan akan kejadian *Tak Bai* yang dipublikasikan menyatakan bahwa korban jiwa yang berjatuhan akibat penembakan, pemukulan dan akibat proses pengangkutan demonstran ke kamp militer merupakan salah satu kelalaian dalam tugas. Meskipun kedua komisi ini berhasil membuat laporan dan

mempublikasikannya ke masyarakat mengenai kejadian tersebut, namun tidak ada satupun aparat militer yang diproses secara hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam menggunakan kekerasan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

4.2. RESPON PEMERINTAH THAILAND TAHUN 2005

Pada tanggal 15 Juli 2005, satu hari setelah serangan besar kelompok etnonasionalis di Yala, parlemen di Thailand mengeluarkan kebijakan yang disebut sebagai *The Emergency Decree on Government Administration in States of Emergency*, yaitu sebuah kebijakan yang memberikan mandat kepada Perdana Menteri untuk memberlakukan undang-undang darurat (*State of Emergency*). Dikeluarkannya kebijakan ini berarti memberikan kewenangan penuh kepada Perdana Menteri untuk menyatakan keadaan darurat di suatu wilayah maupun seluruh wilayah di Thailand. Perdana Menteri mempunyai wewenang untuk mengeluarkan peraturan untuk tidak keluar rumah, peraturan untuk tidak melakukan pertemuan dimana dan kapan saja, peraturan untuk melarang adanya penyebaran berita, surat, atau yang

lainnya dalam bentuk teks, peraturan untuk tidak menggunakan akses jalan dan kendaraan, peraturan untuk tidak menggunakan, memasuki, atau keluar dari suatu gedung atau bangunan, dan yang terakhir adalah Perdana Menteri mempunyai kewenangan untuk mengevakuasi penduduk suatu wilayah atau melarang penduduk memasuki suatu wilayah tertentu (Zhu, 2010:1).

Kebijakan tersebut dikeluarkan dengan tujuan untuk membatasi gerak kelompok etnonasionalisme. Dengan melakukan pelarangan – pelarangan tersebut, kelompok etnonasionalis diyakini akan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi untuk memobilisasi massa dan melakukan perencanaan dalam serangan berikutnya. Pemerintah Thailand juga semakin memperketat gerak kelompok ini dengan menambah pos – pos penjagaan di sudut kota dan pedesaan. Masyarakat yang melanggar kebijakan tersebut akan langsung dicurigai keterlibatannya dalam kelompok etnonasionalisme dan akan ditangkap.

Banyaknya korban yang berjatuh akibat kekerasan yang terjadi di Thailand Selatan menarik perhatian dari warga Thailand yang lain dan dunia internasional. Korban luka akibat kekerasan di Thailand Selatan tidak mendapatkan perawatan yang layak. Hal

ini terjadi karena tenaga medis yang minim akibat banyak dari mereka yang melarikan diri keluar dari Thailand Selatan. Faktor penyebab yang lain adalah karena fasilitas kesehatan banyak yang hancur.

Pada tanggal 19 September 2005 dengan dukungan dari parlemen, Pemerintah Thailand menanda tangani MoU (*Memorandum of Understanding*) untuk membangun sebuah pusat pengobatan dan perawatan bagi korban yang berjatuh pasca diumumkan undang-undang darurat di Thailand Selatan. Pusat pengobatan dan perawatan tersebut dibangun di Patani, di Universitas Prince of Songkhla. Pusat pengobatan dan perawatan ini merupakan hasil kerjasama antara NRC (National Reconciliation Commission), The Lawyers Council of Thailand, dan National Human Rights Commission. Dalam kerjasama ini banyak didatangkan bantuan tenaga medis dan obat – obatan yang memang khusus diperuntukkan untuk merawat dan mengobati korban dari kekerasan yang terjadi di Thailand Selatan.

Selain menawarkan akan tempat perawatan dan pengobatan bagi mereka korban kekerasan di Thailand Selatan, The Lawyers Council of Thailand juga menawarkan bagi setiap warga etnis Muslim Melayu yang ditangkap agar

mendapat pendamping seorang pengacara dalam menghadapi kasusnya untuk melindungi hak – haknya. Pendampingan oleh pengacara ini tidak dipungut biaya dan sepenuhnya bertujuan untuk menegakkan keadilan di Thailand Selatan. Namun menurut laporan yang diterima Amnesty International, program ini tidak berjalan seperti yang diberitakan. Karena nyatanya keadaan dilapangan banyak dari mereka yang ditangkap tidak didampingi oleh pengacara. Hal ini disebabkan oleh tidak ada pengacara yang cukup untuk semua warga yang ditangkap yang dicurigai sebagai anggota kelompok etnonasionalis.

Banyaknya orang – orang yang ditangkap dan ditahan oleh aparat penegak keamanan di Thailand diyakini tidak terlepas dari salah satu kebijakan Pemerintah Thailand. Kebijakan tersebut dikeluarkan pada bulan Agustus 2005, dimana Pemerintah Thailand mengeluarkan daftar orang-orang yang dicurigai keterlibatannya dalam kekerasan dan serangan di Thailand Selatan. Dalam daftar tersebut, terdapat ratusan nama orang – orang yang tersebar di provinsi di Thailand Selatan. Pemerintah Thailand menyatakan bagi orang yang namanya berada di daftar untuk menyerahkan diri ke kepolisian setempat. Dari sekian banyak nama yang tercantum, banyak dari mereka mengaku tidak pernah terlibat

dan terhubung dengan kekerasan dan serangan yang terjadi di Thailand Selatan.

4.3 RESPON PEMERINTAH THAILAND TAHUN 2006

Pada tanggal 19 September 2006, militer Thailand melancarkan serangan kudeta terhadap kepemimpinan Perdana Menteri Thailand Thaksin Sinawatra. Kudeta terjadi karena ketidakpuasan dari pihak militer dan pihak kerajaan terhadap Thaksin. Thaksin disinyalir melakukan sejumlah tindakan korup yang menguntungkan diri sendiri dan orang – orang terdekatnya. Alasan lainnya yang menjadi faktor terjadinya kudeta adalah ketidakpuasan pihak kerajaan terhadap cara Thaksin dalam menangani ketegangan yang terjadi di Thailand Selatan. Kegagalan Thaksin dalam menyelesaikan ketegangan disana dan membuat masalah berlarut – larut menjadi alasan pihak kerajaan Thailand menyetujui dan mendukung kudeta yang dilakukan militer.

Serangan dari militer ini dipimpin oleh Jenderal Shonti Boonyaratglin, seorang etnis Muslim-Melayu yang pertama menjadi petinggi di militer Thailand. Kudeta yang berlangsung berhasil menggulingkan pemerintahan Thaksin. Kerajaan Thailand kemudian mengangkat Jenderal Surayud Chulanont

sebagai Perdana Menteri Thailand yang baru dan bertugas untuk memimpin pemerintahan di Thailand. Pengangkatan Perdana Menteri yang baru ini mendapatkan respon positif dari warga di Thailand Selatan, khususnya etnis Muslim-Melayu.

Dibawah kepemimpinan Surayud, Thailand mulai menggunakan pendekatan baru terhadap kelompok etnonasionalisme di Thailand Selatan dan menghindari cara – cara yang mengandung kekerasan fisik. Surayud mengkaji kembali permasalahan yang terjadi di Thailand dan menjanjikan untuk mempertimbangkan langkah – langkah penyelesaian ketegangan di Thailand Selatan berdasarkan aspirasi etnis Muslim Melayu. Surayud memerintahkan adanya pembenahan kantor – kantor dan urusan administrasi pemerintahan yang sebelumnya hancur sebagai langkah awal perbaikan situasi di Thailand Selatan. Surayud juga mengadakan jumpa pers yang khusus meliputi permintaan maaf dan bela sungkawanya atas peristiwa Tak Bai. Namun Surayud sebagai Perdana Menteri Thailand tidak memberikan perintah untuk mengusut ulang kasus ini dan menangkap siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa yang memakan korban jiwa tersebut.

Perubahan sikap Pemerintah Thailand pasca pergantian Perdana Menteri tidak membuat kelompok etnonasionalisme serta merta mengurangi serangan. Kelompok ini justru semakin intens melakukan serangan terhadap fasilitas dan tempat umum di Thailand Selatan. Banyak warga Thailand Selatan yang beragama Budha yang kerap kali menjadi incaran serangan kelompok ini memilih melarikan diri dari rumah mereka dan keluar dari kawasan Thailand Selatan. Mereka merasa tidak aman akan serangan dan teror yang terjadi. Aparat pemerintah yang bertugas sebagai penjaga perbatasan di Thailand Selatan juga tak luput dari serangan kelompok ini hingga memaksa mereka untuk meninggalkan pos mereka.

Keadaan yang semakin tidak stabil memaksa Pemerintah Thailand yang ingin segera menyelesaikan permasalahan di Thailand Selatan untuk mengambil tindakan cepat. Akhirnya berdasarkan persetujuan dari parlemen, Perdana Menteri Surayud mengeluarkan kebijakan untuk membentuk kembali SBPAC (Southern Border Province Adiministration Center). SBPAC merupakan badan yang khusus dibentuk untuk menangani permasalahan yang terjadi di Thailand Selatan. SBPAC bertugas dengan menjadi jembatan antara pemerintah lokal dengan

etnis Muslim-Melayu di Thailand Selatan. SBPAC menjadi penampung segala keluhan dan aspirasi yang berhubungan dengan kondisi politik di Thailand Selatan. Terjadi eskalasi konflik di Thailand Selatan pasca dibentuknya SBPAC. SBPAC sebelumnya dibentuk pada tahun 1981 dan dibubarkan oleh Pemerintah Thailand pada masa Thaksin di masa awal jabatannya sebagai Perdana Menteri (Wheeler, 2010:6).

5. KESIMPULAN

Wilayah Thailand bagian selatan sudah mengalami ketegangan sejak awal tahun 1990-an. Ketegangan yang terjadi adalah antara etnis Muslim-Melayu yang menjadi warga mayoritas kawasan Thailand Selatan dengan Pemerintah Thailand. Hal ini terjadi karena ketidakpuasan etnis Muslim-Melayu terhadap kebijakan dikeluarkan Pemerintah Thailand yang dianggap tidak memihak mereka dan diskriminatif. yang Masalah yang berlangsung lama dan berlarut di wilayah Thailand Selatan ini memaksa etnis Muslim-Melayu untuk melakukan sejumlah pemberontakan.

Pemberontakan yang dilakukan kelompok etnonasionalisme Muslim-

Melayu dikendalikan dan diorganisir oleh sejumlah organisasi di belakangnya. Organisasi tersebut seperti BRN – C, PULO, serta GMIP. Ketiga organisasi ini merupakan organisasi yang menginginkan adanya perubahan akan nasib etnis Muslim-Melayu di Thailand.

Serangan yang dilakukan oleh kelompok etnonasionalisme ini dinilai mampu mengancam stabilitas dan keamanan nasional Thailand. Hal ini membuat Pemerintah Thailand untuk mengeluarkan sejumlah kebijakan – kebijakan untuk merespon serangan yang terjadi. Sejumlah kebijakan ini seperti mengeluarkan Undang – undang Darurat Militer, kebijakan *State of Emergency*, hingga melakukan penangkapan terhadap orang – orang yang disinyalir terlibat dalam organisasi etnonasionalisme di Thailand Selatan.

Kebijakan – kebijakan dari Thailand dalam merespon ketegangan yang terjadi di Thailand Selatan mendapatkan sorotan dari dunia internasional dan dianggap gagal dalam menyelesaikan konflik yang terjadi yang kemudian memaksa Thailand untuk melakukan pendekatan dan strategi baru dalam menangani konflik di Thailand Selatan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Lexy J. Moleong.(2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Jones, Sara. 2007. *Framing The Violence In Southern Thailand: Three Waves of Malay-Muslim Separatism*. International Studies of Ohio University.
- Liow, Joseph Chinyong. (2006). *Muslim Resistance in Southern Thailand and Southern Philippines: Religion, Ideology and Politics*. Washington: The East-West Center Washington.
- Manmuang, Sanakorn. (2013). *Understanding the Sustainability of Insurgency Conflict in Thailand*. Bangkok: Journal of Organizational Transformation and Social Change.
- McCargo, Duncan. (2010). *Thailand's National Reconciliation Commission: A Flawed Response to the Southern Conflict*. London: Routledge.
- Melvin, Neil.J). 2007. *Conflict in Southern Thailand: Islamist, Violence and the State in the Patani Insugerncy*. Sweden: CM Gruppen.
- Nurakkate, Chumphot. (2012). *The Conflict in Southern Thailand*. Centre for Defence and Strategic Studies Australian Defence College.
- Pandya, Amit & Laipson, Ellen. (2009). *Islam and Politics: Renewal and Resistance in the Muslim World*. Washington DC: The Henry L. Stimson Center.
- Storey, Ian. 2007. *Ethnic Separatism in Southern Thailand: Kingdom Fraying At The Edge*. Asia-Pasific Center for Security Studies.
- Thnaprarnsing, Patcharawat. 2009. *Solving the Conflict in Southern Thailand*. Pennsylvania: U.S Army War College.
- Wheeler, Matt. (2010). *People's Patron or Patronizing the People? The Southern Border Province Administrative Centre in Perspective*. Contemporary Southeast-Asia.
- Yacoob, Che Mohd Aziz. (2011). *Isu dan Penyelesaian: Konflik Pemisah di Thailand Selatan*.Malaysia Journal of History, Politics, & Strategic Studies, Vol.38 (1) (2011), pp.13-34.
- Yuniarto, P.Rudolf. (2004). *Integrasi Muslim Pattani: Reidentifikasi Sosial Atas Dominasi "Nasional" Thailand*.Hermeneia Jurnal Kajian Islam Interdisipliner Vol.3 No.2 Juli-Desember 2004.hal. 165.
- Yuniarto, P.Rudolf. (2005). *Minoritas Muslim Thailand: Asimilasi, Perlawanan Budaya, dan Akar Gerakan Separatisme*.Jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume VII No.1 Tahun 2005.
- Yusuf, Imtiyaz. (2010). *The Role of the Chularajmontri (Shaykh al-Islam) in Resolving Ethno-religious Conflict in Southern Thailand*. American Journal of Islamic Social Sciences Vol. 27 No. 1 Tahun 2010.